



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 75 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Badan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Badan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Badan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 75

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, merupakan ujung tombak dari pemerintah Kabupaten Garut dalam penanggulangan bencana.

Selain itu yang harus diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Garut yaitu kondisi geografis dan curah hujan yang menimbulkan berbagai risiko bencana alam di Kabupaten Garut. Gempa bumi di bawah dasar laut yang menimbulkan gelombang pasang laut dan tsunami merupakan salah satu potensi bencana alam yang dapat melanda wilayah pesisir sepanjang pantai wilayah kabupaten Garut. Juga perlu diwaspadai ancaman letusan gunung api Gunung Papandayan dan Gunung Guntur serta bencana kekeringan, tanah longsor, banjir, angin kencang, dan lain lain yang sering melanda beberapa wilayah di Kabupaten Garut dan tidak menutupi kemungkinan terjadinya bencana non alam seperti akibat kegagalan Teknologi, Epidemologi dan Wabah penyakit serta bencana lainnya.

Untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di wilayah Kabupaten Garut di masa mendatang dengan lebih baik memerlukan suatu rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinir dan menyeluruh, baik dalam tidak terjadi bencana di saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana.

Guna menjamin berlangsungnya pembangunan bidang penanggulangan bencana yang efisien, efektif dan tepat sasaran serta memperhatikan arahan tersebut diatas diperlukan instrumen pertanggungjawaban dalam bentuk Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, sebagai langkah awal untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan pembangunan telah ditetapkan dan hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut disusun berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 29. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD/OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/OPD sebagai bahan evaluasi kinerja dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis; dan
- b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan program secara terukur.

2. Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arahan strategis Visi dan Misi Kabupaten Garut sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD tahun 2019-2024;
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Garut disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut meliputi sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada rencana strategis. Sasaran dalam rencana kerja (Renja) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja BPBD Kabupaten Garut merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rancangan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Garut, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Garut yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen LAKIP BPBD Kabupaten Garut Tahun 2021 pada sisi akuntabilitas keuangan, belanja daerah BPBD Kabupaten Garut sebagai berikut :

Tabel 2.1

Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Garut

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	3.253.888.042	2.991.326.994	91,93
Belanja Langsung	7.956.734.280	7.651.011.803	96,16
Jumlah Total	11.210.622.322	10.642.338.797	94,045

Sumber: LAKIP BPBD Kabupaten Garut Tahun 2021

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 10.642.338.797,- atau sebesar 94,045%,- yang terdiri dari total anggaran belanja Rp. 11.210.622.322,-.

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2021 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja BPBD Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja sasaran yang cukup baik.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam jangka waktu yang pendek pengukuran meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (Outcomes), sedangkan untuk mengukur kinerja dalam jangka waktu yang relatif panjang dalam renja ini tidak dilakukan pengukuran, karena memerlukan waktu yang relatif panjang.

Pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2023 dengan capaian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)

Kabupaten Garut

Nama SKPD : BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (n-2)			Target program dan kegiatan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	
					Target Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan								
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	7 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	30%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-

1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	4 dok	4 lap	4 lap	100%	4 lap	4 lap	30%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan								
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	-	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%	30 Orang/bulan	29 orang (6 bulan)	50%
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	5 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	4 orang (6 bulan)	50%

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	60 stel	60 stel	60 stel	100%	60 stel	60 stel	100%
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	-	-	-	-	30 orang	30 orang	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	50%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	42 jenis	82 jenis	82 jenis	100%	67 jenis	67 jenis	100%
5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	15 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	50%
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	50%
5.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	50%

5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan Pemerintah Daerah								
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang (6 bulan)	50%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	12 bulan	28 unit	28 unit	100%	12 bulan	6 bulan	25%
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	2 unit	2 unit	100%	2 unit	-	-

8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
8.1	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 unit	-	-	-	1 unit	-	-
8.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	4 unit	-	-	-	3 unit	3 unit	100%
8.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	-	-	-	-	10 jenis	2 jenis	20%
8.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	-	-	-	-	7 jenis	7 jenis	100%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
9	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
9.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	-	-

9.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 orang	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 keg	-	-
10	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana								
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dengan sah/legal	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-
10.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	450 orang	150 orang	280 orang	280 orang	100%	560 orang	-	-
10.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	100%
10.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	420 orang	420 orang	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%
10.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	4 jenis	21 jenis	21 jenis	100%	160 paket	160 paket	50%

10.5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 keluarga	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Gladi Kesiapan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-
11	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
11.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	50%	25 orang	25 orang (6 bulan)	25%
11.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 paket	-	18 jenis	18 jenis	100%	1000 paket	-	-

12	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya penataan Sistem dasar penanggulangan bencana								
12.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Perda	-	-	-	-	1 Perda	1 Perda	20%
12.3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kel tangguh bencana	1 dokumen	-	3 desa	3 desa	100%	-	-	-
12.4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 laporan	-	-	-	-	100 persen	-	-
12.5	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	50%

Sumber : Laporan Realisasi Triwulan 2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Kajian capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum bisa dilakukan karena belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2	Presentase perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan pendampingan non fisik	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan pendampingan non fisik	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Presentase penanganan kedaruratan bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Presentase penanganan kedaruratan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

Sumber : Laporan SPM Tahun 2021

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
7. Daerah rawan bencana adalah Daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
8. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan isu dan masalah strategis dimana prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Garut belum memadai untuk memenuhi seluruh dan amanat aturan dan regulasi yang dikehendaki sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan

terintegrasi, kurang memadainya anggaran dalam rangka penanggulangan bencana, kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana yang berjalan secara sektoral serta belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Isu-isu Strategis :

Bahaya

- a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam maupun non alam seperti pandemi Covid-19;
- b. Karakteristik geografis Kabupaten Garut yang memiliki risiko bencana tinggi.

Kerentanan

- a. Tingginya tingkat kerentanan.

Kapasitas

- a. Belum optimalkan pendekatan pentaheliks dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Masih perlu peningkatan implementasi SPM sub urusan bencana;
- c. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai;
- d. Masih kurangnya upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana;
- e. Manajemen logistik dan peralatan yang andal;
- f. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas;
- g. Optimalisasi penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat;
- h. Kajian, Perencanaan dan Penanganan Risiko Bencana perlu mendapat perhatian;
- i. Pemulihan Pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari 2 program, 12 kegiatan, dan 42 sub kegiatan pada rancangan awal RKPD secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 poin	10.671.323.892	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 poin	10.671.323.892	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100%	50.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100%	50.000.000	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 Laporan	20.000.000	
II		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	3.935.731.069	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	3.935.731.069	
	7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.925.731.069	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.925.731.069	
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	
III		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100%	112.423.934	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100%	112.423.934	
	9	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	112.423.934	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	112.423.934	
IV		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	300.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	300.000.000	

	10	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	100.000.000	
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	200.000.000	
V		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	423.168.889	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	423.168.889	
	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	24.864.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	24.864.000	
	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68.304.889	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68.304.889	
	14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	10.000.000	
	17	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	30.000.000	

	18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	250.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	250.000.000	
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.400.000.000	
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.100.000.000	
	20	Pengadaan Mebel	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	200.000.000	
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000	
	22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	
VII		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100%	150.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100%	150.000.000	

	23	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	50.000.000	
	24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	20.000.000	
	25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	80.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	80.000.000	
VIII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan barang milik daerah	100%	300.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemenuhan barang milik daerah	100%	300.000.000	
	26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	200.000.000	
	27	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
B		Program Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah	0,43 poin	20.010.000.000	Program Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah	0,43 poin	20.010.000.000	
IX		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Presentase layanan informasi rawan bencana	100%	10.000.000.000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Presentase layanan informasi rawan bencana	100%	10.000.000.000	

	28	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1dok	0	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1dok	0	
	29	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 orang	10.000.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 orang	10.000.000.000	
X		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	4.810.000.000	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	4.810.000.000	
	30	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	450 orang	510.000.000	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	450 orang	510.000.000	
	31	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	800.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	800.000.000	
	32	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	2.500.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	2.500.000.000	
	33	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang	1 dokumen	100.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang	1 dokumen	100.000.000	

				Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana					Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			
	34	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	200.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	200.000.000	
	35	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	200.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	200.000.000	
	36	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000	
	37	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	200.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	200.000.000	
	38	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Garut	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 keluarga	100.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Garut	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 keluarga	100.000.000	
XI		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	700.000.000	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	700.000.000	
	39	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	200.000.000	
	40	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5000 Orang	500.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5000 Orang	500.000.000	

XII		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Garut	Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1000%	4.500.000.000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Garut	Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1000%	4.500.000.000	
	41	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah desa/kel tangguh bencana	1 dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah desa/kel tangguh bencana	1 dokumen	500.000.000	
	42	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Garut	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	2.000.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Garut	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	2.000.000.000	
	43	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Lokasi kegiatan pasca bencana	1 dokumen	2.000.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Lokasi kegiatan pasca bencana	1 dokumen	2.000.000.000	
						30.681.323.892					30.681.323.892	

Sumber : Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan terkait langsung dengan pelayanan provinsi dan hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: BPBD Kab. Garut

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Program Penanggulangan Bencana				
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kel. Paminggir, Garut Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Desa Pakenjeng, Pamulihan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Desa Karang Sari, Cikelet	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Sukawening, Sukawening	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Desa Sukawening, Sukawening	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Cimanganten, Tarogong Kaler	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
7	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Mekarhurip, Sukawening	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	

8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa, Cintakarya	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 kegiatan	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
9	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Cirapuhan, Selaawi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
10	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Cikajang, Cikajang	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
11	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Jagabaya, Mekarmukti	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
12	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Karangmulya, Kadungora	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
13	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Mandalasari, Kadungora	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
14	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Caringin, Caringin	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
15	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Cimahi, Caringin	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
16	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Cimahi, Caringin	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	
17	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Desa Sindangsari, Cigedug	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 kegiatan	

Sumber : Hasil Musrenbang Kabupaten Garut

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GARUT

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Nasional

Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia?Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Visi BNPB Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Misi Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui

- pengurangan risiko
- Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh

Telaahan Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Barat

BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang tangkas, tanggap dan tangguh dan sesuai Undang –undang No 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana yang terintegrasi.

Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Jawa Barat periode 2018 -2023 yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana dan Menurunkan Kerentanan daerah-daerah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menjadikan masyarakat Jawa Barat Tangguh Menghadapi Bencana.

Sasaran tersebut di atas diukur keberhasilannya melalui 1 Indikator yang diklasifikasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur terpilih dan Indikator Kinerja BPBD Provinsi Jawa Barat yaitu dengan mengukur Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Barat.

Nilai-nilai (values) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan visi. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara dapat ditempuh.

Untuk mencapai Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka nilai utama yang dijadikan pedoman adalah:

1. Memantapkan, memanfaatkan serta memaksimalkan sumberdaya manusia yang proaktif sebagai pelaku pencegahan bencana.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur serta SDM binaan yang terkait, guna meningkatkan kualitas dan produktifitas penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.
3. Komitmen dukungan kapital/anggaran dari Pemerintah yang berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai standar kegiatan terkait.
4. Mengadakan perbaikan-perbaikan/peningkatan manajemen kebencanaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan pencegahan bencana.
5. Memperhatikan, mendayagunakan potensi kearifan budaya lokal yang dijiwai norma-norma keagamaan sebagai dasar penciptaan iklim yang kondusif sebagai penangkal kerawanan bencana.
6. Memanfaatkan para praktisi pemerhati bidang kebencanaan, ilmuwan/ cendikiawan, LSM dan sebagainya untuk saling bahu membahu bekerjasama guna mengatasi permasalahan yang ada demi kemajuan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

➤ **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan kebijakan

Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 tahun 2011 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempunyai Fungsi :

1. Fungsi Koordinasi merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana;
2. Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
7. Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
8. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya,

termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana diantaranya sbb : Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan, sedangkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Terwujudnya Kabupaten Garut yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana.

Sasaran dari RPJMD adalah Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana, sedangkan sasaran Sasaran Renstra (IKU Kepala Perangkat Daerah adalah Meningkatnya kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang di rencanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, yaitu sejumlah 2 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Selain itu, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi hal yang mendasari perumusan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut rancangan awal dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Garut

Kode					Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		78poin	10.671.323.892			78poin	10.279.231.134
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan		100%	50.000.000			100%	80.000.000
1	05	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000

1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.000.000
1	05	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	Tarogong Kidul (BPBD)	4 Laporan	20.000.000	DAU		4 Laporan	30.000.000
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	3.935.731.069			100%	3.324.231.134
1	05	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	30 Orang/bulan	3.925.731.069	DAU		30 Orang/bulan	3.314.231.134
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		100%	112.423.934			100%	110.000.000
1	05	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 dokumen	112.423.934	DAU		1 dokumen	110.000.000
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	300.000.000			100%	300.000.000
1	05	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 paket	100.000.000	DAU		60 paket	100.000.000

1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 orang	200.000.000	DAU		60 orang	200.000.000
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	423.168.889			100%	630.000.000
1	05	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	24.864.000	DAU		1 paket	100.000.000
1	05	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	68.304.889	DAU		1 paket	200.000.000
1	05	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	10.000.000	DAU		1 paket	10.000.000
1	05	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	30.000.000	DAU		1 paket	30.000.000
1	05	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	4 dokumen	10.000.000	DAU		4 dokumen	10.000.000
1	05	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	30.000.000	DAU		1 laporan	30.000.000
1	05	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	250.000.000	DAU		1 laporan	250.000.000

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah		100%	5.400.000.000			100%	5.400.000.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 Unit	1.100.000.000	DAU		2 Unit	1.100.000.000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	5 Unit	200.000.000	DAU		5 Unit	200.000.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	7 Unit	100.000.000	DAU		7 Unit	100.000.000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Unit	4.000.000.000	DAU		1 Unit	4.000.000.000
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		100%	150.000.000			100%	135.000.000
1	05	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	50.000.000	DAU		1 laporan	35.000.000
1	05	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	20.000.000	DAU		1 laporan	20.000.000
1	05	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	80.000.000	DAU		1 laporan	80.000.000

1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah		100%	300.000.000			100%	300.000.000
1	05	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarogong Kidul (BPBD)	30 unit	200.000.000	DAU		30 unit	200.000.000
1	05	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tarogong Kidul (BPBD)	1 unit	100.000.000	DAU		1 unit	100.000.000
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah		0,43 poin	20.010.000.000			0,43 poin	12.510.000.000
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase layanan informasi rawan bencana		100%	10.000.000.000			100%	2.600.000.000
1	05	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Garut	1dok	0	DAU		1dok	200.000.000
1	05	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kab. Garut	100 orang	10.000.000.000	DAU		100 orang	2.400.000.000
1	05	03	2.02	X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	4.810.000.000			100%	5.010.000.000
1	05	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Garut	450 orang	510.000.000	DAU		450 orang	610.000.000
1	05	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 dokumen	800.000.000	DAU		1 dokumen	800.000.000

1	05	03	2.02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Garut	10 unit	2.500.000.000	DAU		10 unit	2.500.000.000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kab. Garut	1 dokumen	100.000.000	DAU		1 dokumen	100.000.000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Garut	1 kawasan	200.000.000	DAU		1 kawasan	200.000.000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Garut	50 Orang	200.000.000	DAU		50 Orang	200.000.000
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Garut	1 Dokumen	200.000.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Garut	100 Orang	200.000.000	DAU		100 Orang	200.000.000
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Garut	50 keluarga	100.000.000	DAU		50 keluarga	100.000.000
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi		100%	700.000.000			100%	400.000.000
1	05	03	2.03	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kabupaten Garut	1 dokumen	200.000.000	DAU		1 dokumen	200.000.000
1	05	03	2.03	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Garut	5000 Orang	500.000.000	DAU		5000 Orang	200.000.000

1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Garut	1000%	4.500.000.000			1000%	4.500.000.000
1	05	03	2.04	03	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kel tangguh bencana	Kab. Garut	1 dokumen	500.000.000	DAU		1 dokumen	500.000.000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kab. Garut	1 dokumen	2.000.000.000	DAU		1 dokumen	2.000.000.000
1	05	03	2.04	06	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lokasi kegiatan pasca bencana	Kab. Garut	1 dokumen	2.000.000.000	DAU		1 dokumen	2.000.000.000
									30.681.323.892				22.789.231.134

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 SIPD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GARUT

Program dan kegiatan yang di rencanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 yang direncanakan, yaitu 1 program penanggulangan bencana dengan 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan, serta 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota dengan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1. dengan jumlah anggaran Rp. 30.681.323.892,-

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Keterangan		
				Desa/ Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD II	APB D I	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Penanggung jawab	Jenis Kegiatan	Ket
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Ketentraman dan Keterktiban Lingkungan Masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana																
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin					10.671.323.892				10.671.323.892			
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	50.000.000				50.000.000		Baru	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	10.000.000				10.000.000	Sekretariat	Baru	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	5.000.000				5.000.000	Sekretariat	Baru	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	5.000.000				5.000.000	Sekretariat	Baru
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	5.000.000				5.000.000	Sekretariat	Baru
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	5.000.000				5.000.000	Sekretariat	Baru
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 Laporan	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	20.000.000				20.000.000	Sekretariat	Baru
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Presentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	3.935.731.069				3.935.731.069		Baru
7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Presentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	3.925.731.069				3.925.731.069	Sekretariat	Baru
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Presentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	10.000.000				10.000.000	Sekretariat	Baru

III		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	112.423.934				112.423.934		Baru
	9	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	112.423.934				112.423.934	Sekretariat	Baru
IV		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	300.000.000				300.000.000		Baru
	10	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100.000.000				100.000.000	Sekretariat	Baru
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	200.000.000				200.000.000	Sekretariat	Baru
V		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	423.168.889				423.168.889		Baru
	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	24.864.000				24.864.000	Sekretariat	Baru

	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	68.304.889				68.304.889	Sekretariat	Baru	
	14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	10.000.000				10.000.000	Sekretariat	Baru	
	15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	30.000.000				30.000.000	Sekretariat	Baru	
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	10.000.000				10.000.000	Sekretariat	Baru	
	17	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	30.000.000				30.000.000	Sekretariat	Baru	
	18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	250.000.000				250.000.000	Sekretariat	Baru	
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.400.000.000				5.400.000.000		Baru	
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.100.000.000				1.100.000.000	Sekretariat	Baru	

	20	Pengadaan Mebel				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	200.000.000				200.000.000	Sekretariat	Baru
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100.000.000				100.000.000	Sekretariat	Baru
	22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.000.000.000				4.000.000.000	Sekretariat	Baru
VII		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	150.000.000				150.000.000		Baru
	23	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	50.000.000				50.000.000	Sekretariat	Baru
	24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	20.000.000				20.000.000	Sekretariat	Baru
	25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	80.000.000				80.000.000	Sekretariat	Baru

VIII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Presentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	300.000.000				300.000.000		Baru
	26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	Presentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	200.000.000				200.000.000	Sekretariat	Baru
	27	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Presentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	100.000.000				100.000.000	Sekretariat	Baru
B		Program Penanggulangan Bencana					Indeks Kapasitas Daerah	0,43 poin				20.010.000.000				20.010.000.000		Baru
IX		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								Presentase layanan informasi rawan bencana	100 %	10.000.000.000				10.000.000.000		Baru
	28	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	Presentase layanan informasi rawan bencana	100 %	0				0	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru
	29	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				Kab. Garut		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 orang	Presentase layanan informasi rawan bencana	100 %	10.000.000.000				10.000.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru

X		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	4.810.000.000				4.810.000.000		Baru
	30	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	450 orang	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	510.000.000				510.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru
	31	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	800.000.000				800.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Baru
	32	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				Kab. Garut		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	2.500.000.000				2.500.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Baru
	33	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100.000.000				100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru
	34	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				Kab. Garut		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	200.000.000				200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru
	35	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	200.000.000				200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru

										terhadap bencana									
36	Penyusunan Rencana Kontijensi					Kab. Garut		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	200.000.000				200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
37	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Kab. Garut		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	200.000.000				200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
38	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Kab. Garut		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 keluarga	Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100.000.000				100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	700.000.000				700.000.000		Baru	
39	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					Kab. Garut		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	200.000.000				200.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Baru	
40	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Kab. Garut		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5000 Orang	Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	500.000.000				500.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Baru	

XII		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 0%	4.500.000.000				4.500.000.000		Baru	
	41	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Jumlah desa/kel tangguh bencana	1 dokumen	Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 0%	500.000.000				500.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
	42	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				Kab. Garut		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 0%	2.000.000.000				2.000.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
	43	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				Kab. Garut		Lokasi kegiatan pasca bencana	1 dokumen	Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 0%	2.000.000.000				2.000.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Baru	
		Jumlah										30.681.323.892				30.681.323.892			

Sumber: Rancangan Akhir Penetapan Renja SIPD

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	4	5	6	7	8	9	10
	Usuran Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					22.789.231.134	
A	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat		79 poin	10.279.231.134	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan		100%	80.000.000	DAU
1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	30.000.000	DAU
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU

	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU
	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Dokumen	5.000.000	DAU
	6		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	Tarogong Kidul (BPBD)	4 Laporan	30.000.000	DAU
II		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	3.324.231.134	DAU
	7		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	30 Orang/bulan	3.314.231.134	DAU
	8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Laporan	10.000.000	DAU
III		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		100%	110.000.000	DAU
	9		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 dokumen	110.000.000	DAU

IV		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	300.000.000	DAU
	10		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 paket	100.000.000	DAU
	11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 orang	200.000.000	DAU
V		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	630.000.000	DAU
	12		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	100.000.000	DAU
	13		Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	200.000.000	DAU
	14		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	10.000.000	DAU
	15		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 paket	30.000.000	DAU
	16		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	4 dokumen	10.000.000	DAU
	17		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	30.000.000	DAU
	18		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	250.000.000	DAU
VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah		100%	5.400.000.000	DAU

	19		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 Unit	1.100.000.000	DAU
	20		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	5 Unit	200.000.000	DAU
	21		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	7 Unit	100.000.000	DAU
	22		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 Unit	4.000.000.000	DAU
VII		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		100%	135.000.000	DAU
	23		Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	35.000.000	DAU
	24		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	20.000.000	DAU
	25		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 laporan	80.000.000	DAU
VIII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Presentase pemenuhan barang milik daerah		100%	300.000.000	DAU

	26		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarogong Kidul (BPBD)	30 unit	200.000.000	DAU
	27		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tarogong Kidul (BPBD)	1 unit	100.000.000	DAU
B		Program Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah		0,43 poin	12.510.000.000	DAU
IX		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Presentase layanan informasi rawan bencana		100%	2.600.000.000	DAU
	28		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Garut	1dok	200.000.000	DAU
	29		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kab. Garut	100 orang	2.400.000.000	DAU
X		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Presentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	5.010.000.000	DAU
	30		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Garut	450 orang	610.000.000	DAU

	31		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 dokumen	800.000.000	DAU
	32		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Garut	10 unit	2.500.000.000	DAU
	33		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Kab. Garut	1 dokumen	100.000.000	DAU
	34		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Garut	1 kawasan	200.000.000	DAU
	35		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Garut	50 Orang	200.000.000	DAU
	36		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Garut	1 Dokumen	200.000.000	DAU
	37		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Garut	100 Orang	200.000.000	DAU
	38		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Garut	50 keluarga	100.000.000	DAU
XI		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Presentase warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi		100%	400.000.000	DAU

	39		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kabupaten Garut	1 dokumen	200.000.000	DAU
	40		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Garut	5000 Orang	200.000.000	
XII		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana		1000%	4.500.000.000	DAU
	41		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kel tangguh bencana	Kab. Garut	1 dokumen	500.000.000	DAU
	42		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kab. Garut	1 dokumen	2.000.000.000	DAU
	43		Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lokasi kegiatan pasca bencana	Kab. Garut	1 dokumen	2.000.000.000	DAU

Sumber: Renstra Perubahan BPBD Tahun 2019-2024

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dalam pelaksanaannya mendapatkan hambatan, yaitu:

- Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM;
- Belum optimalnya pembinaan, monitoring dan pengawasan;
- Keterbatasan anggaran dan wilayah kerja yang luas;
- Tidak semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja dan RENSTRA dapat dilaksanakan diakibatkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah;
- Belum optimalnya koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah belum seluruhnya berkesinambungan dengan kegiatan yang dilaksanakan propinsi/pusat.

Untuk meminimalisasi hambatan dan kendala dalam pencapaian target, maka perlu dilakukan langkah antisipatif dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja yang lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Langkah antisipatif secara umum yang bisa dilakukan dalam peningkatan kinerja penanggulangan bencana, antara lain:

- Mendorong kemandirian masyarakat dalam berusaha serta meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana
- Mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan aparatur serta peningkatan jumlah tenaga teknis;
- Optimalisasi pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran;

- Meningkatkan sinergitas antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah
- Meningkatkan koordinasi ditingkat perencanaan dan pelaksana kebijakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan propinsi/pusat.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mendukung Visi Kabupaten Garut 2019-2024 sebagai implementasi rencana pembangunan tahap terakhir dari RPJP Daerah 2005-2025. Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Garut, di dasarkan pada komitmen, konsistensi dan konsekuensi, serta partisipasi semua pihak terkait, Pemerintah tingkat kabupaten dan non pemerintah serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN